



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

KECAMATAN SIBULUE

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Kecamatan Sibulue ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Sibulue Tahun 2023 memaparkan acuan seluruh Program,kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sibulue selama Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas – prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

Kami menyadari bahwa penyusun Rencana Kerja ini masih belum sempurna sehingga kedepannya dimungkinkan akan semakin meningkat,sehingga saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang

Maroanging, Mei 2022

Camat Sibulue

ANDI ZAINAL WAHYUDI. SE. M.Si

Pangkat :Pembina,IV/a

Nip. 19740304 200701 1 021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	2
Maksud dan Tujuan	3
Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJAKECAMATAN TAHUN LALU.....	5
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sibulue	5
Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sibulue	14
Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	16
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Sibulue	21
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
BAB III	32
Penalihan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sibulue.....	33
Program Dan Kegiatan.....	33
BAB V PENUTUP	37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sibulue
Tabel 2.4	Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Sibulue
Tabel 4,1	Rumusan Rencana Program Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa setiap Perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sibulue berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya

Penyusunan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 bertujuan untuk menghadirkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bone Tahun 2023 agar pembangunan di kabupaten Bone sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah di tetapkan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sibulue adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun berdasar pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibulue Tahun 2018-



2023 sebagai penjabaran rencana kerja (Renja) yang berupa Informasi tentang rencana program dan Kegiatan yang akan dikerjakan dalam satuan Tahunan anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran, dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya. dengan tetap konsisten terhadap upaya perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone. dimana Didalamnya memuat Program / Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan sarana dan prasarana dalam kurung waktu satu tahun kedepan sehingga terwujudnya Pemerintahan yang bersih (Good Governance) .

Untuk melaksanakan program Pembangunan Tahun 2023 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sibulue untuk mengemban tugas dan tanggung jawab berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai sumber daya yang dimiliki, Agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sibulue dapat berjalan dengan baik tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sibulue Tahun 2023 adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025..
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

8. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone nomor 3)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 ini adalah sebagai kerangka acuan dalam pengambilan keputusan tentang Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2023 serta merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Renja Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 antara lain sebagai Berikut:

1. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai dengan RKPD Kabupaten Bone
2. Untuk mengkoordinasikan perencanaan Progrma,Kegiatan dan
3. Sub Kegiatan yang telah di tetapkan dalam 1 (satu) Tahun yang tersusun danlrm rencana
4. Untuk Menjamin adanya kostintensi perencanaan dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD



5. Sebagai bahan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kantor Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sibulue.

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, disusun secara sistematika Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan, Bab ini menguraikan kajian terhadap review terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan, Analisa Kinerja Pelayanan, isu-isu Penting tentang Tupoksi Pegawai Kantor Camat Sibulue serta Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III, Tujuan dan Sasaran, Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan pemerintah, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan serta Program dan Kegiatan Kecamatan Sibulue dalam Kurung waktu satu Tahun Anggaran

Bab IV, Bab Ini memuat tentang Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sibulue

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sibulue dan Capaian Renstra Kecamatan Sibulue merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Kecamatan Sibulue. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sibulue menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sibulue selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk Rencana Kerja Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 dapat memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan– kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Kecamatan Sibulue Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Tabel dibawah melampirkan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sibulue sampai dengan Tahun 2021



Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN SIBULUE KABUPATEN BONE S/D TAHUN 2022 MENGACU PADA RENSTRA PERUBAHAN

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Tahun 2020 s/d tahun 2022

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSU KEWILAYAHAN									
7	KECAMATAN									
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)								



7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perencanaan ,Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	8	3	3	3	100%	3	9	113%	
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu									
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	12	1	1	1	100%	1	3	100%	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawian									
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributn Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	70	0	0	0	100%	10	10	14%	



7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan								
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman / bahan logistik bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan)	6	2	2	2	100%	2	6	1000%



7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan(Kegiatan)	6	2	2	2	100%	2	6	100%
7	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	36	12	12	12	100%	12	36	100%
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	825	200	200	200	100%	275	675	82%
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan								
7	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang dibutuhkan (Unit)	19	1	1	1	100%	2	4	21%
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan (unit)	19	3	3	3	100%	3	9	47%
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan								



7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	144	36	48	48	100%	60	132	92%
7	1	1	208	4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	1008	108	108	108	100%	336	552	55%
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan								
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	15	5	3	3	100%	4	10	67%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)								
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan								



7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7	1	3	201		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)								
7	1	3	201	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (dokumen)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7	1	3	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	6	1	1	1	100%	1	5	83%
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dan Sehat Kelurahan (paket)	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)								
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum								



7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	108	36	36	36	100%	36	108	100%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)								
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa (Laporan)	63	21	21	21	100%	21	63	100%

Sumber Data Dari Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan Dokumen LPPD Kec Sibulue Tahun 2021 Serta Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue

JENIS BELANJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI Triwulan I	%
Belanja Pegawai	14.225.437.199	14.225.437.119	94,94	14.917.791.777	13.814.015.278	20,32
Belanja Barang Dan jasa	743.485.900	743.485.900	86,83	610.745.147	610.745.147	18,60
Belanja Modal	46.349.000	34.550.000	100	67.293.250	0	0
Jumlah	15.211.116.855	15.003.473.099	94,43	15.595.830.174	14.492.053.675	20,17



Pada tabel ini disajikan target dan realisasi pada Tahun 2021, serta Target dan perkiraan capaian kinerja Tahun 2022 (Tahun Berjalan) dengan rincian indikator kinerja dan target serta realisasi Keluaran (Output). Secara pencapaian kinerja Kecamatan Sibulue bisa dikatakan berjalan dengan sesuai target dan capaian kinerja yang diharapkan, begitu juga target sasaran dan capaian kinerja dalam Renstra Kecamatan Sibulue sudah terlaksana dengan baik pula. Anggaran yang ada pada Tahun 2021 telah terlaksana sebesar 94,43 % artinya bisa dikatakan berhasil, namun dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 akibat covid 19 yang kegiatannya tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun sehingga tidak bisa dilaksanakan akan 100%. dan pada tahun berjalan 2022 belum bisa dilakukan pengukuran karena baru berjalan satu triwulan. dan Pada 2022 sementara berjalan bulan Mei belum mencapai triwulan kedua sehingga realisasi anggarannya hanya dapat diukur sampai triwulan Pertama sebesar 20,17%



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sibulue Tahun 2023

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dua Boccoe

Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Sibulue merupakan suatu penkajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Sibulue dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak dan hasil atas pelayanan kinerja serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Sibulue sesuai tugas dan fungsinya.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat Daerah serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Setelah adanya perubahan Renstra Tahun 2018-2023, ketiga indikator tujuan dan kelima indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dicapai untuk pelaksanaan renja tahun 2021 hingga 2023 (3 tahun tersisa dari periode Renstra). Pencapaian target kinerja dari IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja pelayanan Kecamatan Sibulue Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis. Gambaran pencapaian kinerja Kecamatan Sibulue Kab. Bone sesuai Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yang disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sibulue Kab. Bone

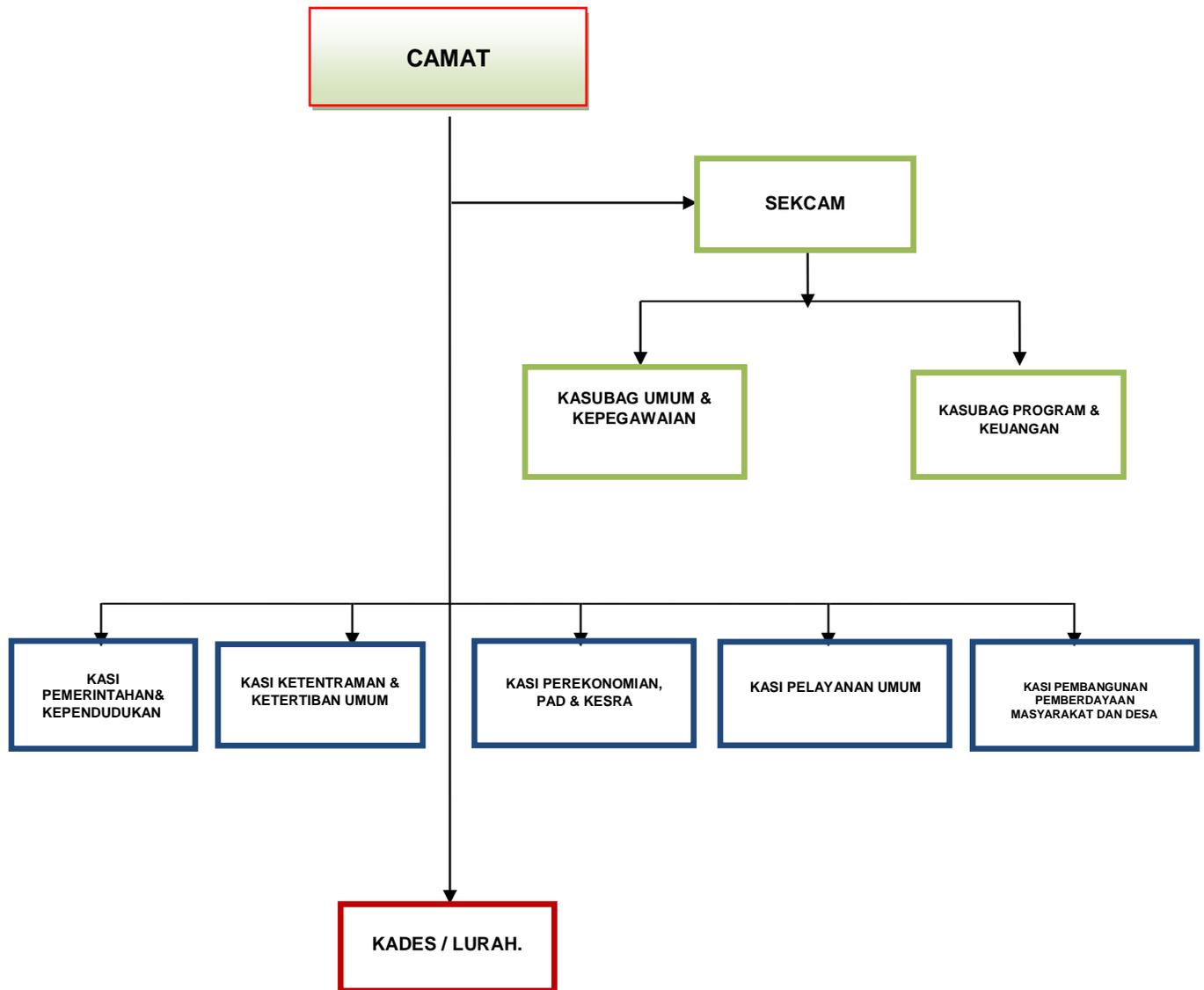
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020/ K	Tahun 2021/K	Tahun 2022/K	Tahun 2023/K	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP			B	B	B	BB	B	B	B	B	- Capaian Indikator Kinerja Tujuan Yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe, Dapat Diketahui bahwa realisasi target adalah Indikator Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dengan Capaian 100% Mencapai Target namu persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (<i>stagnan</i>) dengan Predikat B. - Capaian Indikator ini diperoleh dari Nilai Predikat Sakip berdasarkan Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. Sehingga diperlukan juga peran dari berbagai stakeholder dari segi Evaluasi/Asistensi sehingga menghasilkan dokumen yang baik yang relevan sesuai dengan RPJMD dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			94	96	98	100	97,21	98,83	100	100	indikator pelayanan di Kecamatan Sibulue beserta capaian Kinerja pelayanan dijelaskan bahwa dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu Indikator Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan, dimana Indikator ini mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya yakni dari 97,21 % menjadi 98,83% sehingga bisa dikatakan mencapai Target atau berhasil -Keberhasilan dari indicator Sasaran ini tidak lepas dari tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Sibulue yang ditindak lanjuti sesuai dengan standar pelayanan. -Pengawasan dan evaluasi secara langsung oleh atasan langsung juga merupakan salah satu factor pendukung keberhasilan Indikator Ini.

Sumber Data : Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec Sibulue Lakip Kecamatan Sibulue Tahun 2021.



2.2.1 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Kecamatan Sibulue diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut



Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas pembantu Bupati



melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan dan tugas kepada Daerah.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- d. Pengoordinasian Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah ditingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggara kegiatan Desa dan /atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah daerah yang ada diKecamatan;dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekertaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

Seretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Penyusun program dan Anggaran pada Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Program dan Anggaran
 - c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kerja dilingkungan Kecamatan.
 - d. Penyusunan bahan Dekumentasi dan statistik,peraturan perundang-undangan Pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaran kemitraan dengan masyarakat.
 - e. Penyusuna Data ,Evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja Kepada Camat.
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan naska dinas dan kearsipan;
 - h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan ;dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.
2. . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan penermaan,pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat,naskah dinas dan pengelolaan kearsipa;
 - b) Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian
 - c) Membuat usulan mutasi,kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti pensiun ,pemberhentian,izin belajar,kartu pegawai,kartu askes dan pembinan karier pegawai



- d) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan menyiapkan rapat-rapat dinas ;
- e) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber Daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- f) Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor perlengkapan kantor dan asset lainnya.
- g) Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana /perlengkapan /asset
- h) Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Seretariat Kecamatan terkait tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan, mengumpulkan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan
- b) Melaksanakan fasilitas dan penyelarasan program dan penggaran dilingkungan kecamatan;
- c) Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan dilingkungan Kecamatan
- d) Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja
- e) Menyiapkan rencana umum pengadaan
- f) Membuat rencana kerja tahunan
- g) Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- h) Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan
- i) Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang – undangan
- j) Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
- k) Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l) Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
- m) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan
- n) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- o) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan
- p) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan



- q) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan
 - r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Kecamatan terkait tugasnya
4. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- Kepala Seksi Pemerintahan dan kependudukan mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan serta pembinaan keagrariaan.
 - b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan kependudukan dan catatan sipil
 - c) Menyiapkan bahan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - d) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa / kelurahan.
 - e) Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - f) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - g) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - h) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - j) Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - k) Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 - l) Memfasilitasi penataan ,pemanfaatan ,dan pendayagunaan ruang Desa penetapan dan dan penegasan batas Desa
 - m) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
 - n) Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, dan
 - o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 - b) Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban
 - c) Memfasilitasi Penyelesaian sengketa tanah
 - d) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan
 - e) Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - f) Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada seksi Ketentraman, dan Keteriban Umum
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat
6. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat



dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi

- b) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan.
- c) Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- d) Mengoordinasikan pendamping desa di wilayahnya;
- e) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
- f) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan partisipatif
- g) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- h) Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat
- b) Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat
- c) Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan
- d) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, Pendidikan , kebudayaan dan ketenagakerjaan ;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan
- f) Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan social
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- h) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- i) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa
- j) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan Kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan
- k) Melaksanakan Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;
- l) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya

8. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a) Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum



- b) Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum
- c) Memfasilitasi Pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan pemukiman
- d) Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum
- e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum
- f) Melaksanakan Pelayanan administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Seksi Pelayanan Umum
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Sibulue

Melihat gambaran permasalahan pembangunan ditingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sibulue adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Sibulue sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi produktivitas aparatur.
 - c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
 - d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur
 - d. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone, terhadap capaian program nasional / internasional dan agar terwujudnya Pemerintahan yang bersih (Good Governance) .Pencapaian visi dan misi Kecamatan Sibulue sebagai penjabaran visi misi kabupaten Sibulue sekiranya akan memberikan kontribusi yang cukup positif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun rancangan Renja perangkat daerah . Dalam rancangan awal RKPD tercantum program – Kegiatan yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dan pelaksanaan Pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, melakukan Review kebutuhan



masyarakat sehingga akan menghasilkan program – program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Pemerintah.

Program dan Kegiatan yang tertian di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sibulue perlu dilakukan sikronisasikan dengan Rancangan awal RKPD sehingga dapat dirumuskan program dan kegiatan defenatif untuk diajukan menjadi Rencana Kerja.

Berikut Tabel Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023.



Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KECAMATAN SIBULUE

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Kepermendagri 050,5889.	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah</i>		19.947.056.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah</i>		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		66.093.750	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		27.737.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sibulue	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja PD yang tersusun	12 Dokumen	48.395.950	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sibulue	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	41.000.0001
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Sibulue	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000



	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu		18.526.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu		10.744.549.432
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Sibulue	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	280 Orang/ Bulan	14.232.338.938	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Sibulue	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/ Bulan	14.232.338.938
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		665.887.500	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		169.842.860
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sibulue	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	2 Kegiatan	49.948.070	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Sibulue	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	19.100.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Sibulue	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	33.151.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Sibulue	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	15.000.000



10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Sibulue	Jumlah Penyediaan Logistik (Makanan dan Minuman) Bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	2 Kegiatan	60.720.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Sibulue	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	98.000.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Sibulue	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan	2 Kegiatan	11.690.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Sibulue	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	20.000.000
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Sibulue	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 kali	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Sibulue	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	33.500.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sibulue	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan SKPD Yang diikuti -	12 Laporan	82.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	117.128.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		107.325.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		31.025.880
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Sibulue	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	17.983.960	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Sibulue	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	17.983.960
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		236.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		235.039.200



16	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sibulue	Jumlah Rekening Listrik,Telpon/Wifi dan Air	24 Rekening	19.268.324	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	50.000.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Sibulue	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Pelayanan Umum/ Administrasi Keuangan selama setahun	24 Laporan	88.226.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	88.900.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		337.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan		54.707.330
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Atau lapangan	6 Paket	55.941.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec Sibulue	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	80.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		60.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		25.074.750
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		60.750.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		25.074.750



20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Sibulue	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang diikuti dan dilaksanakan	27 Documen	27.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27 Laporan	27.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)		1.037.250.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)		190.927.460
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		911.250.000	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		175.927.460
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel.Unyi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	140.296.800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Maroanging	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000
23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel.Unyi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	10.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Maroanging	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	100.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)		111.375.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)		27.000.000
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Persentase Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum		111.375.000	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Persentase Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum		27.000.000



24	Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Sibulue	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	27 Laporan	27.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)		33.750.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)		29.202.300
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		Persentase Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		33.750.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		29.202.300
25	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)(laporan)	12 Laporan	15.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Sibulue	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21 Laporan	30.000.000
					14.910.362.042					10.375.887.949

Sumber Data Dari Aplikasi SIPD Tahun 2023 Permendagri 050.5889



Pada table 2.4 ini diuraikan secara rinci mengenai Rancangan awal anggaran Kecamatan Sibulue pada RKPD tahun 2022 dan analisis kebutuhan tahun 2023.pada prinsipnya alokasi yang diberikan pada RKPD Tahun 2023 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan Program,kegiatan dan sub kegiatan yang tertera di dalam Perubahan renstra Kecamatan Sibulue Tahun 2013-2028 dengan Pagu rancangan RKPD sebesar Rp.**28.190.181.250** sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi Pagu Renja pokok tahun 2023 **Rp. 14.422.587.432**.namun pada tahap Indikator Sub Kegiatan mengalami Perubahan atau penyesuaian dengan Kempemendagri 050 5889.

2.5 Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui Pelaksanaan Musrenbang ditingkat Desa / Kelurahan yang dilakukan beberapa hari sebelumnya dengan membagi Tim Pelaksana Musrenbang tingkat Desa . Kelurahan sehingga diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat yang diusulkan sesuai prioritas program Pembangunan yang akan dijadikan rencana Pembangunan Daerah. Dari sinilah akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat ,namun terkadang usulan yang masuk belum bias di realisasikan oleh setiap OPD tertentu sehingga harus menyesuaikan kondisi keuangan Daerah.

Namun pada pelaksanaan Musrenbang Tahun ini Kecamatan Sibulue tidak mengusulkan Kegiatan secara spesifik Kepada OPD.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rumusan visi Pembangunan Daerah tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023, memperhatikan Sembilan program prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, termasuk merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bone selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**”

Adapun keselarasan ataupun sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional tampak di dalam table berikut ini:

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULAWESI SELATAN	PRIORITAS KABUPATEN BONE
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Perbaikan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerintahan	Penguatan Infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pengembangan Kawasan pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan social dasar lainnya
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Penurunan kesenjangan social Ekonomi	Percepatan pembangunan daerah bertumpu pada pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung	Pembangunan Manusia	Pengembangan Inovasi daerah untuk mendukung



	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		pembangunan Daerah dan pelayanan public
6	Membangun Lingkungan hidup,meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan,ketertiban,ketertarikan dalam kemajemukan masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sibulue

Berdasarkan dari rancangan dari pernyataan Misi yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun,dan ditetapkannya perubahan Rencana Strategis , maka Kecamatan Sibulue dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone adalah:

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sibulue

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan , yaitu suatu yang akan dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan datang.berdasarkan tujuan yang telah ditetapkanadalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan public

3.3 Program Dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Bone pada tahun 2023 sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai **Rp11.422.587.432**

A. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ Kegiatan : Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - ❖ Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Kegiatan : Asministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Kegiatan : Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program :Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- C. Program :Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - ❖ Sub Kegiatan
 - a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
- D. Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertiban umum
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- E. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Renja Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sibulue Tahun 2023 yang telah disusun merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas .Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat oprasional yang pendanaanya bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) ,yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kebijakan ,Program dan Kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuang Misi sehingga Visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan –persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung Jawab Pemerintah dalam megadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat ,Community Base Development (CDB) dengan keterlibatan lebih banyak dari pelaku (Stakeholdes) dalam mencciptakan Good Governmance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampak kebawah (Trcle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar – benar dikedepankan

Dalam proses pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government yang terintegrasi dengan Peraturan Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan kembali Indikator ,satuan serta Target Sub Kegiatan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,kemudian dilakukan penginputan Program,kegiatan dan sub kegiatan melalui Aplikasi SIPD yang dapat dilihat sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 disusun sebagai wujud dukungan sistem Administrasi Pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan rencana Kerja (Renja) adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan tanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Bone

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan berbagai sektor pelayanan sangat tergantung pada kapasitas aparat dalam merumuskan kebijakan untuk melaksanakan berbagai bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menghasilkan pembangunan oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Untuk menjaga efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Program kegiatan Kecamatan Sibulue perlu melakukan pengendalian serta evaluasi di masing masing penanggung jawab Sub Kegiatan sehingga Dengan dirumuskannya rencana Kerja (Renja), Kantor Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya proyeksi 1 (Satu) tahun kedepan, hal ini dikarenakan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Program , Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.